

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA
PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana

Ekonomi (S1)

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh:

MONICA SOEJOTO

NPM: 13 04 20408

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA,
2017**

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP
PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA
PERUSAHAAN - PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI**

Monica Soejoto

I Putu Sugiarta Sanjaya

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Babarsar 43-44, Yogyakarta

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan elemen penting bagi kesuksesan perusahaan dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Banyak penelitian terkait CSR memberikan hasil yang berbeda. Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel independen kepemilikan yang digunakan adalah kepemilikan publik. Variabel dependen CSR diukur dengan menggunakan *Global Reporting Initiative Index 3.1* (Indeks GRI 3.1). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 290 perusahaan publik yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012 diperoleh dengan metode *purposive sampling*. Pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini mengimplikasikan bahwa jika kepemilikan publik meningkat maka jumlah pengungkapan CSR juga meningkat.

Kata kunci: *corporate social responsibility*, kepemilikan publik

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan suatu entitas ekonomi yang dibentuk dan didirikan untuk menghasilkan laba (*profit oriented*) agar dapat *going concern*. Namun, perkembangan usaha akhir-akhir ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi melainkan ada aspek lain seperti aspek sosial dan lingkungan. Pengaruh tersebut memunculkan paradigma baru yang dikenal dengan *Triple Bottom Line* (Wibisono, 2007).

Menurut Wibisono (2007), jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) (Untung, 2008).

CSR merupakan elemen penting bagi kesuksesan perusahaan dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Sesuai dengan *stakeholder theory*, perusahaan akan berupaya untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial yang akan memberikan kontribusi kepada *stakeholder* baik eksternal maupun internal. Maka dari itu, pengambilan keputusan ekonomi hanya dengan melihat kinerja keuangan suatu perusahaan saat ini sudah tidak relevan lagi. Eipstein dan Freedman (1994) menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan.

Kepemilikan oleh investor individual di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan disebut kepemilikan publik (Suchman, 1995). Besarnya kepemilikan oleh investor individual ini biasanya di bawah 5%, sehingga investor tidak mempunyai kendali atas perusahaan. Menurut *Agency Theory* (Jensen dan Meckling, 1976), tujuan utama dalam hubungan keagenan adalah terciptanya keselarasan tujuan (*goal congruence*). Dalam rangka memenuhi keselarasan tujuan, investor (*principal*) harus tahu apa saja yang dilakukan oleh perusahaan yang dijalankan oleh manajer (*agent*). Namun, dalam praktiknya manajer sering kali bertindak oportunistik sehingga menyebabkan terjadinya asimetri informasi, yaitu adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki antara *agent* dan *principal*. Transfer informasi melalui publikasi dalam laporan tahunan perusahaan diperlukan untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut.

Aktivitas industri perusahaan banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai alat untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial dan sarana komunikasi. Besarnya pengungkapan CSR yang akan dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi pula oleh besarnya kepemilikan publik. Semakin besar kepemilikan

publik maka pengawasan dari publik juga semakin besar dan diharapkan pengungkapan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin besar. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan perhatian publik terhadap perusahaan (Ponnu dan Maurice, 2009).

Di Indonesia, wacana mengenai kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan dan tanggung jawab sosial telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No 40 pasal 74 tahun 2007 dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012, yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam Pasal 66 ayat 2c dinyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Dengan demikian, item-item CSR yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela (*voluntary*).

Penelitian oleh Sari *et al.* (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian Kristi (2013) dan Rindawati (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan, Indraswari dan Astika (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan publik justru berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut merupakan fenomena yang menarik minat penulis untuk melakukan pengujian ulang dengan menggunakan sampel dari semua perusahaan publik yang terdaftar di BEI untuk menggeneralisasi semua penelitian, karena mungkin dipenelitian sebelumnya terjadi bias dan rentang waktu penelitian terlalu singkat.

Rumusan Masalah

Pengungkapan item-item CSR pada laporan tahunan perusahaan tergolong ke dalam pengungkapan sukarela, sehingga menjadi kewenangan perusahaan untuk menentukan informasi apa saja yang akan disajikan. Jenis dan jumlah informasi yang tersaji dalam pengungkapan sukarela kemungkinan mengalami perbedaan satu sama lain. Perbedaan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh besarnya kepemilikan publik dalam perusahaan. Maka dari itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut.

Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI.

LANDASAN TEORI

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak satu orang atau lebih pemegang saham dalam memerintah orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama pemegang saham. Dalam konteks perusahaan, orang lain yang melakukan jasa atas nama pemegang saham adalah manajer. Manajer diberi kewenangan untuk mengambil keputusan terkait dengan operasi perusahaan. Manajer diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (*goal congruence*). Manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi daripada pemegang saham. Manajer memiliki akses yang luas terhadap informasi perusahaan sedangkan *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja manajer. Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi. Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik, untuk mengutamakan kepentingan pribadinya.

Perusahaan yang melakukan aktivitas CSR wajib melakukan pengungkapan dalam laporan tahunannya. Namun, keputusan terkait banyaknya item yang diungkapkan masih menjadi wewenang manajer (*agent*) yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tahunan. Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi karena pemilik saham publik (*principal*), dimana mereka tidak memiliki kendali atas tindakan yang dilakukan oleh manajer akan memiliki lebih sedikit informasi. Maka dari itu meningkatkan kepemilikan saham publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi tersebut.

Stakeholder Theory

Menurut Gray *et al.* (2001), *stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Para *stakeholder* yang dimaksud antara lain adalah masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pasar modal, dan lain-lain. Asumsi teori *stakeholder* dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar sehingga masyarakat memiliki hubungan tak langsung dengan perusahaan dan memperhatikan perusahaan. Praktik pengungkapan CSR memainkan peran yang penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat sehingga kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan melalui pengungkapan CSR.

Legitimacy Theory

Teori legitimasi secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar perusahaan memperoleh penerimaan masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009). Deegan, *et al.* (2002) menjabarkan bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara

keberadaan dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan terancam. Dengan demikian, pengakuan dari masyarakat dapat diperoleh perusahaan dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya.

Corporate Social Responsibility Disclosure

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Bagi perusahaan yang melakukan CSR, pengungkapan aktivitas CSR dalam laporan tahunan bersifat *mandatory* namun banyaknya item yang diungkapkan terkait dengan aktivitas CSR tersebut bersifat *voluntary*. Banyak sedikitnya item yang diungkapkan menjadi wewenang manajer di perusahaan tersebut.

Kepemilikan Publik

Menurut Suchman (1995), kepemilikan publik adalah kepemilikan oleh investor individual di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kepemilikan saham oleh publik menggambarkan tingkat kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. Besarnya kepemilikan oleh investor individual ini biasanya di bawah 5%, sehingga investor tidak mempunyai kendali atas perusahaan. Variabel ini ditunjukkan dengan prosentase saham yang dimiliki oleh publik dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat dengan total saham perusahaan yang beredar.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut *agency theory* (Jensen dan Meckling, 1976), di antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) harus terdapat keselarasan tujuan. Namun dalam praktiknya sering terjadi asimetri informasi dikarenakan manajer bertindak oportunistik dan lebih mementingkan tujuan pribadinya. Asimetri informasi adalah kondisi di mana informasi yang dimiliki manajer lebih banyak daripada informasi yang dimiliki pemegang saham. Informasi yang dimaksud dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan di laporan tahunan.

Pemegang saham publik adalah pihak yang tidak memiliki kendali atas perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham publik membutuhkan perlindungan investasi yang mereka tanam, perlindungan ini dapat berupa pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan pada laporan tahunan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan, jika proporsi saham yang dimiliki publik lebih besar, maka pengawasan dari publik juga lebih besar sehingga dapat mencegah manajer untuk bertindak oportunistik. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki publik maka tingkat kelengkapan pengungkapan pada laporan tahunan akan semakin tinggi pula.

Stakeholder theory menjelaskan bahwa *stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan Gray *et al.* (2001). Praktik pengungkapan CSR memainkan peran yang penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup dan beroperasi di lingkungan masyarakat/publik. Oleh karena itu, pemegang saham publik memerlukan informasi terkait aktivitas CSR perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak operasi perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan melalui pengungkapan CSR di laporan tahunan. Jika demikian, adanya kepemilikan saham oleh publik akan mendorong perusahaan untuk lebih luas atas pengungkapan CSR di laporan tahunan.

Menurut teori legitimasi (Reverte, 2009), jika perusahaan ingin *going concern* maka perusahaan memerlukan penerimaan dari masyarakat/publik yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan CSR. Pengungkapan CSR ke dalam laporan tahunan dapat digunakan perusahaan sebagai bentuk komunikasi kepada pemegang saham publik. Jika proporsi kepemilikan saham publik dalam perusahaan lebih besar, maka perusahaan perlu memperoleh penerimaan lebih besar sehingga perusahaan harus lebih luas dalam mengungkapkan CSR di laporan tahunan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian oleh Sari *et al.* (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian oleh Kristi (2013) dan Rindawati (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan, Indraswari dan Astika (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan publik justru berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Dari uraian ketiga teori tersebut dan didukung dengan hasil penelitian oleh Sari *et al.* (2015), hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

Ha : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility

METODOLOGI PENELITIAN

Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dari seluruh perusahaan publik yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Peneliti memilih untuk menggunakan semua perusahaan publik yang terdaftar di BEI karena beranggapan bahwa setiap perusahaan di semua industri dalam menjalankan bisnisnya pasti akan berdampak pada lingkungannya, baik alam maupun sosial. Selain itu, pemilihan semua perusahaan publik dimaksudkan untuk menggeneralisasi penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu industri dan rentang waktu penelitiannya terlalu singkat.

Peneliti memilih tahun 2010 sesuai dengan *cut off* dikeluarkannya peraturan terkait kewajiban pengungkapan aktivitas CSR pada laporan tahunan yakni pada tahun 2007, namun tahun 2008 dan 2009 tidak dipergunakan karena pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global dan tahun 2009 dianggap sebagai tahun pemulihan pasca krisis 2008. Penelitian ini melibatkan semua sektor industri di

BEI. Oleh karena itu, memasukkan tahun 2008 dan 2009 ditakutkan akan menyebabkan penelitian menjadi bias. Alasan peneliti membatasi penelitian hingga tahun 2012 dikarenakan pada tanggal 1 Agustus 2012 dikeluarkan peraturan baru yakni Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep 431/BI/2012 dan diberlakukan bagi penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012. Peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban penyampaian aktivitas CSR dan item-item apa saja yang harusnya dimasukkan ke dalam laporan tahunan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian hingga tahun 2012 untuk melihat pengungkapan sukarela CSR saat belum ada peraturan yang mengatur tentang jenis item yang harus dimasukkan ke dalam laporan tahunan. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan ciri atau pertimbangan tertentu (Hartono, 2013). Sampel penelitian ini adalah laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan publik dengan kriteria sebagai berikut.

1. Perusahaan *listing* sebelum tahun 2010 dan tidak *delisting* selama tahun 2010 hingga 2012.
2. Perusahaan mengungkapkan laporan tahunan untuk periode akuntansi tahun 2010 hingga 2012 yang dapat diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
3. Telah menerbitkan laporan tahunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 sampai 31 Desember 2012 secara lengkap.
4. Selama tahun 2010 hingga 2012, perusahaan memiliki ekuitas yang positif.

Dari pemilihan sampel berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel penelitian yang digunakan adalah 290 data untuk masing-masing periode 2010 hingga 2012.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi	N
CSR	0.01190	1	0.098	0.0878	870
Kepemilikan Publik	0.00004	0.9467	0.284	0.1861	870
DER	0.00360	16.450	1.958	2.6842	870
Ukuran Perusahaan	9.23737	20.270	14.41	1.9536	870

Sumber : Lampiran IV

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai minimum dan maksimum pengungkapan CSR untuk 870 sampel perusahaan publik adalah 0.01190 dan 1. Nilai rata-rata CSR adalah sebesar 0.098, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan publik di BEI dalam periode penelitian hanya mengungkapkan

antara 8 hingga 9 item *Corporate Social Responsibility* menurut GRI 3.1. Standar deviasi pengungkapan CSR sebesar 0.0878. Hasil di atas juga menunjukkan bahwa nilai minimum dan maksimum dari kepemilikan publik adalah sebesar 0.00004 dan 0.9467, serta nilai rata-rata kepemilikan publik sebesar 0.284 dengan standar deviasi 0.1861. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan publik yang terdaftar di BEI sahamnya dimiliki oleh publik sebesar 28,4%. Nilai minimum DER sebesar 0.0036, nilai maksimum DER sebesar 16.45 dan rata-rata DER sebesar 1,958, serta standar deviasi sebesar 2.6842. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel lebih banyak menggunakan pendanaan dari utang ketimbang dari pada modal sendiri. Nilai minimum dan maksimum ukuran perusahaan masing-masing sebesar 9.23737 dan 20.270. Nilai rata-rata ukuran perusahaan adalah sebesar 14,41,serta standar deviasi sebesar 1.9536.

Uji Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t	Signifikansi
Konstata	-0,082	-	-
Kepemilikan Publik	0,012	2,015	0,044
DER	-0,001	-2,456	0,014
Ukuran perusahaan	0,011	17,152	0,000

Sumber : Lampiran IX

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan memperoleh persamaan sebagai berikut.

$$Y = -0,082 + 0,013X_1 - 0,001X_2 + 0,011X_3 + e$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Jika tidak ada kepemilikan publik, DER dan ukuran perusahaan maka pengungkapan CSR adalah sebesar -0,082.
2. Koefisien regresi kepemilikan publik sebagai X_1 adalah 0,013, yang berarti jika kepemilikan publik naik sebesar 1 satuan, maka pengungkapan CSR akan mengalami kenaikan sebesar 0,013 satuan.
3. Koefisien regresi dari DER sebagai X_2 adalah -0,001, yang berarti jika DER naik sebesar 1 satuan, maka pengungkapan CSR akan mengalami penurunan sebesar 0,001 satuan.
4. Koefisien regresi dari ukuran perusahaan sebagai X_3 adalah 0,011, yang berarti jika ukuran perusahaan naik sebesar 1 satuan, maka pengungkapan CSR akan mengalami kenaikan sebesar 0,011 satuan.

Pembahasan

Pengaruh kepemilikan publik terhadap Pengungkapan CSR

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan publik mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR, sehingga hipotesis dalam penelitian ini yakni kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sari *et al.* (2015) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Perusahaan yang *go public* dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkap informasi yang memadai dan relevan dengan tujuan menciptakan pasar modal yang efisien. Dalam suatu perusahaan, jika proporsi saham yang dimiliki publik lebih besar, maka pengawasan dari publik juga lebih besar. Investor dari pihak di luar manajemen atau investor publik membutuhkan perlindungan investasi yang mereka tanam, perlindungan ini dapat berupa informasi non-keuangan dan keuangan yang disampaikan perusahaan melalui laporan tahunan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki publik maka tingkat kelengkapan pengungkapan laporan tahunan akan semakin tinggi pula.

Pengungkapan dalam laporan tahunan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komunikasi kepada investor, salah satunya kepada investor publik. Investor publik terdiri dari masyarakat, baik itu yang berada di sekitar lingkungan perusahaan maupun yang tidak. Oleh karena itu, investor publik tentu saja akan *concern* terhadap aktivitas CSR perusahaan yang diketahui melalui pengungkapannya dalam laporan tahunan. Jika demikian, kepemilikan saham oleh investor publik akan mendorong perusahaan untuk lebih luas atas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaruh DER terhadap Pengungkapan CSR

Hasil analisis menunjukkan bahwa DER mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sembiring (2005) mengenai pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung kepada kreditur dalam pembiayaan aset perusahaan. Besarnya utang perusahaan kepada kreditur dapat diketahui melalui tingkat *leverage* perusahaan. Sembiring (2005) menyatakan bahwa manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukannya supaya tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*.

Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan CSR

Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hubungan signifikan antara variabel ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR mengandung arti bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan itu akan cenderung melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas. Perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disorot, maka perusahaan harus berusaha memperoleh legitimasi *stakeholder* dengan tujuan menyelaraskan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dan norma perilaku yang ada dalam masyarakat.

Perusahaan besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang besar bagi masyarakat akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan aktivitas sosial perusahaan, sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Indraswari dan Astika (2015) serta Kristi (2013) yang berkaitan dengan pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR
2. *Leverage* sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR
3. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Keterbatasan Penelitian dan Saran

Adapun keterbatasan dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Variabel independen yang digunakan hanya kepemilikan publik, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel kepemilikan lain seperti kepemilikan keluarga, manajerial, institusional, asing, maupun menambah variabel lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR.
2. Penelitian ini menggunakan semua perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan membedakan untuk masing-masing industri atau membagi sampel ke dalam *high profile* atau *low profile*.
3. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2010 hingga 2012. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan melihat pada periode sebelum krisis atau sebelum penetapan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
4. Terdapat unsur subyektivitas dalam menilai luasnya pengungkapan, hal ini terjadi karena setiap peneliti melihat pengungkapan CSR melalui sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu disarankan untuk melibatkan pihak lain dalam menentukan luas pengungkapan untuk meminimalkan unsur subyektivitas dalam penilaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Corporate Watch Report. (2006). *Whats wrong with corporate social responsibility?*. Diambil dari www.corporatewatch.org.
- Deegan, C., Rankin. M., dan Tobin, J. (2002). An Examination of the Corporate Social and Environmental Disclosure BHP from 1983-1997 a Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15 (3): 312-343.
- Epstein, M. J., dan Freedman, M. (1994). Social Disclosure and The Individual Investor. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 7: 94-109.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM. SPSS 19* (Edisi 5). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gray, R., Javad, M., Power, D.M., Sinclair, C.D. (2001). Social and Environment Disclosure, and Corporate Characteristic: A Research Note and Extension. *Journal of Business Finance and Accounting*, 28 (3): 327-356.
- Hartono, Jogyanto. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta: BPFE.
- Indraswari, G.A.D dan Astika, I.B.P. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan CSR. *Jurnal Akuntansi*, 11: 289-302.

Jensen, M. dan Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3: 305-306.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep 431/Bl/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Kristi, A.A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (1): 2-18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Ponnu, C.H. dan Maurice O.A. (2009). Corporate Social Responsibility Disclosure in Kenya: The Nairobi Stock Exchange. *African Journal of Business Management*, 3: 601-608.

Reverte, C. (2009). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings by Spanish Listed Firms. *Journal of Business Ethics*, 88: 351- 366.

Rindawati, M.W. (2015). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIESIA Surabaya.

Sari, H.S., Indriyani, H., dan Merina, C.I. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). Diambil dari <http://digilib.binadarma.ac.id>.

Scott, W.R. (2012). *Financial Accounting Theory* (Edisi 6). USA: Pearson Prentice Hall.

Sembiring. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Study Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi 8*.

Suchman, M.C. (1995). Managing Legitimacy: Strategies and Institutional Approach. *Academy of Management Review*, 20 (3): 571-610.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Untung, H.B. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

Sumber Internet:

<http://www.idx.co.id>

<http://www.globalreporting.org>